

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan dari Evaluasi Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Penerima Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi, maka dapat disimpulkan:

1. Program pensiun adalah salah satu program yang bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Uang pensiun yang diterima atau diperoleh pensiunan atau ahli warisnya dikenakan pemotongan menurut PPh Pasal 21. Apabila uang pensiun dibayar secara berkala.
2. Untuk perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan PT Taspen mengikuti ketentuan yang berlaku pada umumnya yaitu dengan menentukan penghasilan bruto yang diterima yaitu uang pensiun yang dibayar secara berkala disetiap bulannya dan tunjangan lainnya dikurangi dengan biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto (pensiun) sehingga menjadi penghasilan bersih atau neto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diakhirnya Penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang kesemuanya ditanggung oleh pemerintah juga melalui APBN, dibuktikan dengan adanya suatu sistem yang ada dengan mencetak bukti potong pajak penghasilan pasal 21.
3. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diawali dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), menghitung tarif 44 Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai pada Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu)

tahun, dan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak.

4.2 Saran

1. PT. Taspen harus memiliki kebijakan yang lebih komprehensif, juga lebih banyak lagi fokus pada peningkatan koordinasi saat melakukan perhitungan antar bagian divisi yaitu divisi customer service, divisi spesifikasi persyaratan dan distribusi aplikasi untuk menghindari kesalahan informasi yang mengakibatkan penghitungan ganda.
2. PT. Taspen sebaiknya terus meningkatkan pelayanan untuk lansia salah satunya lebih detail sosial besarnya hak pensiun yang diterima dihitung sedemikian rupa peserta mengetahui dengan jelas besarnya pajak penghasilan mereka dikenakan biaya.